

# **ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Gampong Meunasah Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara)**

**Neny Triana**

Jurusan Ekonomi Pembangunan  
STIE Lhokseumawe  
Email: triana.neni92.yahoo.co.id.

## **ABSTRAK**

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan suatu kebijakan merupakan suatu kebijakan merubah perilaku masyarakat dari yang semula menggunakan minyak tanah beralih ke pengguna LPG yang di nilai pemerintah lebih memberikan penghematan baik dari sisi konsumen atau masyarakat maupun pemerintah sendiri, selain untuk menyediakan bahan bakar yang ramah lingkungan, bersih dan cepat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap peningkatan pendapat masyarakat. Meski awalnya banyak yang akan berhasil, konversi Minyak Tanah ke LPG menjadi fenomena penting program konversi energi di Indonesia. Apalagi, keberhasilan mengubah kebiasaan masyarakat yang turun temurun dari generasi menggunakan Minyak Tanah beralih ke LPG bukan sekedar persoalan teknis, namun juga sarat dengan aspek sosial dan budaya. Model yang di gunakan adalah metode deskriptif untuk memberikan gambaran tentang keadaan diri responden.

**Kata Kunci :** Konversi Minyak Tanah ke LPG dan Pendapatan Masyarakat.

### **A. PENDAHULUAN**

Program konversi minyak tanah ke gas elpiji merupakan suatu kebijakan merubah perilaku masyarakat dari yang semula menggunakan minyak tanah beralih ke penggunaan elpiji yang dinilai pemerintah lebih memberikan penghematan baik dari sisi konsumen atau masyarakat maupun sisi pemerintah sendiri, selain untuk menyediakan bahan bakar yang ramah lingkungan, bersih dan cepat bagi masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam rangka merealisasikan program konversi minyak tanah ke bahan bakar

gas atau yang lebih dikenal dengan elpiji (LPG). Kebijakan tersebut terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Seperti yang diketahui bahwa subsidi tersebut memang cukup menyulitkan para pengambil kebijakan di negeri ini. Bagaimana tidak, setiap tahunnya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dibebani dengan besarnya subsidi yang harus ditanggung terutama untuk subsidi BBM. Menurut Beawiharta (2001:133) "Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor minyak bumi, yang bergabung dengan OPEC (*organization*

*of petroleum countries*). Bahwa kandungan minyak bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 72,1 miliar barel. Bila tingkat penyedotan diperkirakan 30% cadangan yang dapat disedot sejak tahun 1950 hingga kini (1990) mencapai 13,1 miliar barel”.

Dalam teori kebijakan publik, Menurut Muhadjir (2000:33) dijelaskan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan umum haruslah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan rata-rata warga negara, seperti kebijakan konversi minyak tanah keLPG. Namun yang mampu kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh, tetapi yang kemampuannya di bawah rata-rata kebijakan tersebut sangat membebankan, sehingga diperlukan komplemen *social welfare policy* (kebijakan kesejahteraan sosial) dan secara ekonomi perlu subsidi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak adalah tingginya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Minyak tanah sebagai bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh kalangan bawah menimbulkan bengkaknya anggaran pemerintah dalam pensubsidiannya. Terjadi pemborosan yang sangat besar jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan (subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2006 sebesar Rp. 64,212 trilyun, khususnya minyak tanah sebesar Rp. 31,58 trilyun). Untuk menekan besaran subsidi tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersepakat untuk mengurangnya dan mengkonversi minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk LPG (*Liquefied Petroleum Gas*).

Selain menghemat anggaran negara, penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalori efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai gas buang yang lebih bersih dan ramah lingkungan (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007). Pengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena:

(1) Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avtur; (2) Pengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi; dan (3) Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan.

Program konversi minyak tanah ke LPG Pemerintah juga berusaha untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Menurut Wijaya (2003:29) “kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Mengingat minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari segenap masyarakat, maka gangguan pada pendistribusian minyak tanah menjadi “matador” bagi banyak dimensi kehidupan. Misalnya, akibat terbatasnya minyak tanah, maka transportasi menjadi terbatas. Jika transportasi terbatas, maka berbagai kegiatan masyarakat dalam menggerakkan

roda perekonomian dan pertanian akan terganggu. Harga-harga semakin meningkat. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal yang sama juga berlaku dalam industri, yang menjadi tidak mampu lagi memproduksi secara normal, jika tidak mendapatkan suplai minyak tanah sebagaimana mestinya. Semuanya itu ibarat mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Kelangkaan minyak tanah memang bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena produksi dalam negeri dan juga impor yang menurun. Hal ini membuat pasokan minyak tanah menjadi amat terbatas. Kedua, karena jalur pendistribusian minyak tanah yang belum tertata dengan baik. Belum lagi diperparah dengan ulah oknum-oknum spekulan yang hendak meraup untung dengan menimbun minyak tanah. Namun dengan kerja keras, maka kedua problema akan dapat diatasi. Dengan demikian, krisis minyak tanah dapat ditanggulangi.

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada perbedaan pendapatan masyarakat setelah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan masyarakat setelah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

## **D. TEORI**

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2008:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, yang dikutipnya dari pendapat Graycar, dimana menurutnya bahwa :*Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan

sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja (2003:30) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Hal ini senada dengan David Easton dalam Toha (2010:107), merumuskan sebagai berikut : *"the authoritative allocation of value the whole society but it turns out that only government can aauthoritatively act on the whole society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocationof values"* dalam artian bahwa kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut.

Kebijakan publik atau dikenal juga dengan public policy merupakan semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan

beberapa kebijakan lainnya. Kebijakan publik sendiri memiliki pengertian baik luas ataupun sempit,. Kebijakan publik menurut Dunn (2000 :109) adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Sementara Young dan Quinn dalam Suharto (2008: 44) membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan

karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Setelah mengerti tentang makna kebijakan maka proses pembuatan kebijakan tersebut juga harus diketahui. Dalam proses pembuatan kebijakan dibutuhkan beberapa tahap menurut Suharto (2008 : 78) diantaranya adalah tahap identifikasi, implementasi dan evaluasi. Tahap pertama misalnya adalah tahap identifikasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa poin yang perlu dicatat yaitu: (a) identifikasi masalah dan kebutuhan; (b) analisis masalah dan kebutuhan; (c) penginformasian rencana kebijakan; (d) perumusan tujuan kebijakan; (e) pemilihan model kebijakan; (f) penentuan indikator sosial; dan (g) membangun dukungan dan legitimasi publik.

## **E. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Gampong Meunasah Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara. Penulis memilih Gampong tersebut sebagai lokasi penelitian bahwa kehidupan masyarakat di daerah ini sangat sulit beralih dari minyak tanah ke LPG. Sehubungan dengan ini masyarakat masih bergantung pada distribusi

minyak tanah. Dalam hal ini, di lokasi tersebut penulis ingin mengetahui pendapatan masyarakat setelah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Menurut Sulistiyono (2005:90), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Gampong Keude Geudong yang menjual minyak tanah baik sebelum adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG ataupun sesudah adanya konversi tersebut. Adapun yang menjadi populasi adalah sebanyak 10 pedagang. Kesepuluh populasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1 Populasi**

No	Nama
1	M. Kasem
2	Burhanuddin
3	Syakbi
4	Muhammad Iqbal
5	Husaini
6	Nurdin
7	Azwir
8	Kak Liana
9	Bang Dan
10	Taleb

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 penjual minyak tanah masyarakat Gampong

Keude Geudong, diantaranya yaitu M. Kasem, Burhanuddin, Syakbi, Muhammad Iqbal, Husaini, Nurdin, Azwir, Kak Liana, Bang Dan, Taleb.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner; merupakan daftar yang berisi serangkaian pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang. Metode ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada responden.
2. Wawancara; merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan nara sumber atau pihak-pihak terkait, yaitu responden maupun pihak masyarakat yang menggunakan minyak tanah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait

permasalahan dalam penelitian ini. Metode wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang mungkin belum terangkum dalam kuesioner.

### F. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah sesuatu hal berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:60). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik positif atau negatif sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pendapatan Masyarakat	Hasil yang diterima oleh masyarakat dari hasil usaha setelah dipotong pengeluaran sebelum dan sesudah kebijakan konversi minyak tanah ke LPG	a. Sebelum adanya kebijakan konversi b. Sesudah adanya kebijakan konversi	Normal

### G. Metode Analisis Data

Untuk menggambarkan atau mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya pada penelitian analisis kebijakan konversi minyak tanah ke LPG

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara, maka analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif .

Metode analisis data deskriptif dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Data umur, jenis kelamin, dan penghasilan dianalisis secara deskriptif.

## **H. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sebelum dan Sesudah Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG**

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pendapatan dan penjualan minyak tanah sebelum dan sesudah adanya Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 sebagai berikut :

#### **Jumlah Penjualan Minyak Tanah Sebelum dan Sesudah Konversi Minyak Tanah**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Rata-rata Penjualan Perhari</b>	
		<b>Sebelum Konversi</b>	<b>Sesudah Konversi</b>
1	M. Kasem	55 Liter	25 Liter
2	Burhanuddin	25 Liter	8 Liter
3	Syakbi	35 Liter	17 Liter
4	Muhammad Iqbal	50 Liter	23 Liter
5	Husaini	25 Liter	13 Liter
6	Nurdin	35 Liter	15 Liter
7	Azwir	35 Liter	13 Liter
8	Kak Liana	45 Liter	22 Liter
9	Bang Dan	35 Liter	18 Liter
10	Taleb	25 Liter	11 Liter
Jumlah		365 Liter	165 Liter
Rata-rata		36,5 Liter	1,65 Liter

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak tanah yang terjual sebelum adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yaitu M. Kasem sebelum konversi 55 liter dan sesudah konversi 25 liter, Burhanuddin sebelum konversi 25 liter sementara sesudah konversi yaitu 8 liter, Syakbi sebelum adanya kebijakan konversi yaitu 35 liter dan sesudah adanya kebijakan konversi hanya 17 liter. Kemudian Muhammad Iqbal jumlah minyak tanah yang terjual sebelum adanya kebijakan konversi

jumlah minyak tanah yang terjual 50 liter, sementara setelah adanya konversi jumlah minyak tanah yang terjual hanya 23 liter. Selanjutnya Husaini sebelum adanya konversi hanya 25 liter minyak tanah yang terjual dan sesudah konversi 13 liter dan Nurdin jumlah minyak tanah yang terjual sebelum adanya konversi mencapai 35 liter sedangkan sesudah adanya konversi hanya 15 liter. Kemudian Azwir jumlah minyak tanah yang terjual sebelum adanya kebijakan konversi jumlah minyak tanah yang

terjual 35 liter, sementara setelah adanya konversi jumlah minyak tanah yang terjual hanya 13 liter. Selanjutnya Kak Liana sebelum adanya konversi hanya 45 liter minyak tanah yang terjual dan sesudah konversi 22 liter dan Bang Dan jumlah minyak tanah yang terjual sebelum adanya kebijakan konversi jumlah minyak tanah yang terjual 35 liter, sementara setelah adanya konversi jumlah minyak tanah yang terjual hanya 18 liter, sedangkan Taleb sebelum adanya konversi hanya 25 liter minyak tanah yang terjual dan sesudah konversi hanya 11 liter.

Penjualan minyak tanah sebelum adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG rata-rata penjualan sebanyak 36,5 liter, namun setelah adanya konversi minyak tanah ke LPG rata-rata penjualan hanya 16,5 liter. Rata-rata penurunan penjualan sesudah adanya konversi minyak tanah ke LPG adalah sebanyak 20 liter. Dapat disimpulkan bahwa setelah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, penjualan minyak tanah mengalami penurunan.

### **Jumlah Pendapatan Pedagang Minyak Tanah Sebelum dan Sesudah Konversi Minyak Tanah**

No	Nama	Rata-rata Pendapatan Perhari	
		Sebelum Konversi	Sesudah Konversi
1	M. Kasem	120.000	120.000
2	Burhanuddin	60.000	20.000
3	Syakbi	80.000	86.000
4	Muhammad Iqbal	120.000	92.000
5	Husaini	60.000	60.000
6	Nurdin	80.000	60.000
7	Azwir	80.000	50.000
8	Kak Liana	120.000	70.000
9	Bang Dan	90.000	80.000
10	Taleb	70.000	60.000
Jumlah		880.000	698.000
Rata-rata		88.000	69.800

Sehubungan dengan tabel 4.5 di atas, hasil penelitian menunjukkan terdapat perbandingan pendapatan pedagang sebelum dan sesudah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG tersebut. Pendapatan M. Kasem sebelum konversi Rp.120.000,-, perhari

sesudah konversi Rp.120.000,-, Burhanuddin sebelum konversi Rp. 60.000,- sesudah konversi Rp.20.000,-, Syakbi sebelum konversi Rp.80.000,-, sesudah konversi Rp.86.000,-, Muhammad Iqbal sebelum konversi Rp.120.000,-, sesudah konversi

Rp.92.000,- Husaini Rp.60.000,-, sesudah konversi Rp.60.000,-, Nurdin sebelum konversi Rp.80.000,-, sesudah konversi Rp.60.000,- Azwir sebelum konversi Rp.80.000,-, sesudah konversi Rp.50.000,- Kak Liana sebelum konversi Rp.120.000,-, sesudah konversi Rp.70.000,-, Bang Dan sebelum konversi Rp. 90.000,-, sesudah konversi Rp.80.000,- dan Taleb sebelum konversi Rp.70.000,-, sesudah konversi Rp.60.000,-

Pendapatan penjual minyak tanah sebelum adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG rata-rata pendapatan sebesar Rp.88.000, namun setelah adanya konversi minyak tanah ke LPG rata-rata pendapatan sebesar Rp. 69.800. Rata-rata penurunan pendapatan sesudah adanya konversi minyak tanah ke LPG adalah sebesar Rp. 18.200. Dapat disimpulkan bahwa setelah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, pendapatan penjual minyak tanah mengalami penurunan.

## **I. Hasil Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya setelah kebijakan konversi minyak tanah ke LPG berlangsung, jumlah permintaan minyak tanah jauh lebih rendah jika dibandingkan sebelum adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Dengan kata lain konversi minyak tanah ke LPG yang dijalankan oleh pemerintah sampai saat ini berhasil, namun pendapatan penjual minyak tanah mengalami penurunan setelah adanya konversi minyak tanah ke LPG.

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan

kebutuhan tersebut mengakibatkan *opportunity cost* bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Salah satu masalah keterbatasan manusia di jaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dikarenakan BBM merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kondisi tersebut dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Jikalau kita tinjau, permasalahannya bermula dari keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) di dunia yaitu dengan semakin melambungnya harga minyak dunia. Satu-satunya jalan ialah Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada di Indonesia sendiri guna mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara penghasil minyak seperti Arab. Namun sangat disayangkan, ternyata kenyataan berkata lain karena Indonesia sendiri belum cukup mandiri untuk mengelola minyak bumi yang ada di tanah Indonesia ini karena keterbatasan teknologi yang ada di Indonesia.

Pratinjau lagi pada masalah harga minyak dunia dimana harga minyak yang melambung tersebut juga berimbas pada harga jual minyak di Indonesia otomatis subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak yang meliputi solar, bensin, minyak tanah, dan lainnya, juga meningkat sehingga menguras APBN dan devisa negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai revisi APBN harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar dapat menjalankan kegiatan perekonomian dan pemerintahan di Indonesia. Selain itu, imbas dari keterbatasan APBN dan devisa negara maka pemerintah

terpaksa mengurangi pasokan bahan bakar minyak terutama minyak tanah, karena anggaran subsidi bahan bakar terbesar digunakan untuk mensubsidi minyak tanah. Hal ini dikarenakan peran minyak tanah adalah sebagai bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat mulai untuk keperluan sehari-hari sampai untuk melakukan usaha-usaha mikro. Karena bersinggungan dengan kehidupan ekonomi rakyat banyak dan pengelolaan APBN maka tidaklah mengherankan jika pasokan minyak tanah harus dibatasi yang kemudian berdampak pada naiknya harga minyak tanah di pasaran domestik.

Melihat hal tersebut maka pemerintah mencari solusi supaya masyarakat dapat berhemat dalam pemakaian bahan bakar untuk sehari-hari. Di sisi lain pemerintah juga tidak tinggal diam dengan turut menghemat atau mengalokasikan anggaran dana APBN untuk hal lain. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, yang mana jika dilakukan penghitungan yang cermat maka masyarakat dengan biaya yang sama dapat menggunakan LPG yang lebih menguntungkan daripada minyak tanah. Tetapi sayang dalam pelaksanaannya ternyata benar-benar tidak semudah yang kita kira dimana persoalan ini masih menemui banyak hambatan, yang diantaranya disebabkan karena sebagian masyarakat sudah terbiasa menggunakan minyak tanah, apalagi pemerintah terlalu mendadak dan tidak terencana secara komprehensif.

## J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapatan antara rata-rata pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di Gampong Meunasah Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara sudah mulai beralih ke LPG.

## K. Saran

1. Pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya dengan menstabilkan harga LPG di tingkat masyarakat dan menahan untuk menaikkan harga LPG untuk beberapa waktu kedepan serta meningkatkan kualitas produk program seperti selang dan regulator.
2. Pemerintah wajib menelusuri penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi, sehingga kalau memang benar-benar menyimpang Agen perlu diberi teguran/sanksi.
3. Peneliti lanjutan diharapkan bisa meneliti dampak lain sebagai akibat diberlakukannya program konversi minyak tanah ke LPG.

## L. Referensi

- Abidin, Said Zainal, (2004), *Kebijakan Publik*. Penerbit Pancur Siwah, Jakarta.
- Adiningsih Sri, Kadarusman, (2003), *Teori Ekonomi Mikro*, BTSE Anggota ITKI, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Beawiharta, (2001). *Minyak Bumi di Indonesia*, Eksilopedi Nasional

- Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Daryanto. (2011), *Manajemen Pemasaran*. PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. Bandung.
- Dyckman, Thomas R., Ronald E. Dukes dan Charles J. Davis. (2002). *Akuntansi Intermediate*. Edisi ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Dunn, Wilyam, H, (2000), *Pengantar Analisis Kebikakan Publik*, edisi II, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Durianto, Darmadi, dkk. (2004). Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. (2001). *Metodologi Research*. Yayasan Penelitian Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, (2002), *Teori Akuntans*. Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan, Iqbal, (2002), *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia: Bogor Selatan.
- Kadji, Yulianto, (2008), *Impelemntasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach*, Jurnal Teknologi dan Manajemen Indonesia, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Universitas Merdeka Malang
- Keban, Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Issu*. Grava Media Jogjakarta.
- Kotler, Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran* Jilid I (edisi Bahasa Indonesia). PT Prenhalindo Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2005). *Manajemen Pemasaran*. Prehallindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2009). *Manajemen Pemasaran* jilid II, PT Indeks, Jakarta.
- Kotler, Philip & Gary Amstrong. (2001). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi Kedelapan, Jilid 2. Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Erlangga, Jakarta.
- Lamb, Charles W. dkk. Daniel . (2001), *Pemasaran* Buku II. Salemba Empat, Jakarta.
- Mowen, John C dan Minol. Michael. (2002), *Perilaku Konsumen*. Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng, (2000), *Kebijakan dan Perencanaan Sosia*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Mustopadidjaja, AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Penerbit LAN, Jakarta.
- Nawawi, Ismail. (2009), *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. PNM, Surabaya.
- Nugroho, Riant, (2009), *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, (2007), *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli, Budiman, 2000. *Pola Kebij. Publik tentang Kerjasama antar Pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dalam Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Cirebon*

- Raya, Pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Sugiyono. (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV, Alfabeta, Bandung.
- Suharto Edi, (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sukirno.(2002). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Graha Persada, Jakarta
- Sulistiyono, (2005), *Analisis Data*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenaga kerjaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suwitri, Sri. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syafie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thoha, Miftah, (2010), *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Permada Media Group, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, (2003), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. III, Gramedia Persada Utama, Jakarta.
- Wild, J.J., K.R. Subramanyam, & Robert F. Halsey. (2003), *Financial Statement Analysis*, trans. Yanivi S. & S. Nurwahyu. Salemba Empat, Jakarta.
- Yunus, Mukhlis. (2009). *Etika Bisnis Problema & Solusinya*. Edisi Pertama. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- \_\_\_\_\_.(2008). *Ekonomi Manajerial, Kajian Strategi dan Aplikasi*. Cetakan I. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.